

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Oleh:

MUH ALI MASNUN

NIM: 0810113314

Disetujui Tanggal 6 Februari 2012

Pembimbing Utama

Moh. Fadli, SH, M.Hum.  
NIP. 19650401 199002 1 001

Pembimbing Pendamping

Lutfie Effendi, SH, M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfie Effendi, SH, M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Disusun oleh:  
**MUH ALI MASNUN**  
**NIM: 0810113314**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Moh. Fadli, SH, M.Hum.**  
**NIP. 19650401 199002 1 001**

Ketua Majelis Pengaji,

**Prof. Dr. Sudarsono, SH, MH**  
**NIP. 19510825 197903 1 004**

**Lutfie Effendi, SH, M.Hum.**  
**NIP. 19600810 198601 1 002**

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara,

**Lutifie Effendy, SH, MH**  
**NIP. 19600810 198601 1 002**

Mengetahui  
Dekan,

**Dr. Sihabudin, SH, MH**  
**NIP. 19591216 198503 1 001**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUH ALI MASNUN

NIM : 0810113314

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul  
**“PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN YANG BERSIH”** adalah benar-benar karya saya sendiri  
dan belum pernah diajukan pemenuhan persyaratan untuk memperoleh untuk  
memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Brawijaya maupun Perguruan  
Tinggi lain.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terbukti karya ini  
merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun tidak dalam rangka  
memperoleh kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar  
kesarjanaan saya.

Malang, Februari 2012

Yang Menyatakan,

MUH ALI MASNUN  
0810113314

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT alhamdullilah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Malang dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Skripsi ini disusun berdasarkan studi analisis pada Inspektorat Kabupaten Malang. Setiap instansi pemerintah agar menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, maka penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dalam penulisan skripsi ini ada tiga hal penting yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut, dan optimalisasi kerja auditor.

Keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur menyebabkan skripsi ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan. Untuk itu penulis akan sangat menghargai apapun pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selanjutnya, dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan, dukungan, baik moril maupun materill hingga selesainya skripsi ini. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak, ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing Utama Bapak Moh. Fadli, SH.



MHum yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan gagasan yang sangat berarti.

Disamping itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Keluarga Penulis, Bapak Ibu tercinta, dan semua saudara atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH;
3. Bapak Lutfie Effendi, SH. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya;
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
5. Bapak Djanuri, S. Sos, Didiet Candrae, S. Sos. MM, dan Ibu Djanti, S. Sos selaku responden penulis dalam pelaksanaan pengambilan data di Inspektorat Kabupaten Malang;
6. Keluarga keduaku yang ada di Bono Abah, Ibuk, yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan dalam menapaki hidup ini;
7. Sahabat terbaikku, Mang Dadang, Om Aki, Jek, Kang Riyadi, Naryo, Dodo, Syekh Puji terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya dalam berbagai hal;
8. Kawan-kawan Unit Aktivitas Mahasiswa Korps Sukarela Universitas Brawijaya yang selalu memberikan kesempatan untuk berbagi kepada orang lain;

9. Teman satu kontrakan Rujak (Adi Mlecek, Ifan Preketek, Heroes, Aruel, Ricko Ceper);
10. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian amin.

Malang, Februari 2012

Penulis



**DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Prinsip Penyelenggaraan Negara yang Bersih ...	12
B. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .....	17
C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Keuangan Daerah .....	20
1. Pengawasan dalam Perspektif Negara Hukum, Demokrasi dan Prinsip Penyelenggaraan Negara yang Bersih .....	24
a. Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum .....	24
b. Pengawasan ditinjau dari Sudut Pandang Negara Hukum .....	25
c. Pengawasan ditinjau dari Sudut Pandang Demokrasi .....	26
d. Pengawasan dalam Hubungannya dengan Penyelenggaraan Negara yang Bersih .....	28
2. Pengaturan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Hukum Positif .....	29
a. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .....	29
b. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .....	32

c.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.....	34
d.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007.....	35
e.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah.....	36
3.	Macam-macam Pengawasan.....	37
4.	Kelembagaan dan Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	41
a.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kepala Daerah.	41
b.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh DPR/DPRD.....	44
c.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh APIP.....	46
1.	Pengawasan oleh BPKP.....	48
2.	Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Dalam Negeri.....	50
3.	Pengawasan oleh Inspektorat Daerah.....	51
d.	Pengawasan oleh BPK.....	55
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	64
B.	Metode Pendekatan .....	64
C.	Lokasi Penelitian.....	65
D.	Populasi dan Sampel.....	65
E.	Jenis dan Sumber Data.....	66
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	68
G.	Metode Analisis.....	69
H.	Definisi Operasional.....	70
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	71
1.	Kondisi Geografis dan Demografi.....	71
2.	Visi dan Misi Kabupaten Malang.....	73
B.	Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Malang.....	77
1.	Lokasi Inspektora Kabupaten Malang.....	77
2.	Dasar Hukum Inspektorat Kabupaten Malang.....	78
3.	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Malang.....	79
4.	Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Malang.....	84
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang.....	85



C. Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Malang dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih.....	86
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Malang.....	87
2. Prinsip-prinsip Dasar Standar Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Malang.....	97
3. Standar Umum Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Malang.....	105
D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Malang dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih.....	110
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Malang ..... 83



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Realisasi Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kab. Malang.....	93
Tabel 2 Realisasi Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Non Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (Non-PKPT) Inspektorat Kab. Malang.....	93
Tabel 3 Temuan terhadap Kelemahan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Inspektorat Kab. Malang.....	94
Tabel 4 Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PKPT Inspektorat Kab. Malang.....	96
Tabel 5 Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Non-PKPT Inspektorat Kab. Malang.....	97
Tabel 6 Alokasi Anggaran APBD Kab. Malang dan Ketersediaan Anggaran pada DPA Inspektorat Kab. Malang.....	112
Tabel 7 Realisasi Penyelesaian Temuan Hasil Pada Pemutakhiran Data oleh Inspektorat Kab. Malang.....	113



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Malang dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara menganalisa hukum yang bukan hanya sebagai suatu perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang ada atau realita di lapang. Lokasi penelitian bertempat di Inspektorat Kabupaten Malang. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, dengan metode wawancara, yang dilengkapi dengan melakukan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah : (1). Pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah dilakukan beberapa tahap meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan. (2). Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Malang sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintahan antara lain aspek ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, aspek kelembagaan serta dasar penilaian kerja pimpinan unit kerja agar suatu temuan benar-benar dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak terulang kembali. 3). Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu SDM yang dimiliki para anggota yang terbatas pada kemampuannya dalam menjalankan tugas, kurangnya keahlian anggota di bidang pengawasan, kurangnya perhatian dari pimpinan SKPD/Unit Kerja atas hasil temuan dari tim pengawas, dan juga belum adanya sanksi yang tegas dari pimpinan atas SKPD/Unit Kerja yang lalai menindaklanjuti atas temuan hasil pengawasan.

Seyogyanya Inspektorat Kabupaten Malang lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana yang menjadi hambatan dapat dioptimalkan penggunaannya. Sebisa mungkin Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat menyediakan alokasi anggaran dana yang cukup untuk pengawasan di lapangan.

Kata kunci: Pengawasan Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintahan yang Bersih



## ABSTRACT

This research aims to determine how the implementation of internal control by the local financial management Inspectorate of Malang Regency in the implementation and follow-up monitoring to achieve clean government.

This study uses sociological approach to research legal issues of law by analyzing the law not only as a regulatory device that is normative, but rather an approach based on legislation that is associated with facts or reality. Study sites located in Malang Regency Inspectorate. Types and sources of data consists of primary data by the interview method, which comes with doing secondary data through literature study and documentation.

The results of this study were: (1). Implementation of financial management internal control carried out several stages of supervision include planning, implementation and monitoring and reporting of monitoring results. (2). Follow-up results of Malang Regency Inspectorate supervision is needed in order to improve government management, among others, aspects of management and human resources personnel, and institutional aspects of the assessment work for each head of a finding can actually be solved completely and not reoccur. 3). In practice there are several obstacles faced by the human resources that of the members is limited in its ability in performing the task, lack of expertise of members in the field of supervision, lack of attention from the leadership SKPD / Work Unit on the findings of the supervisory team, and also the absence of strict sanctions on the leaders SKPD / work unit who fails to follow up on oversight findings.

Malang Regency Inspectorate should further improve the quality of human resources, facilities and infrastructure are the bottlenecks can be optimized its use. As much as possible Malang Regency Government can provide a sufficient budget allocation for supervision.

Key words: Internal Controls, Local Financial Management, Clean Government

